

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara	16
1. Keuangan Negara	16
2. Perbendaharaan Negara	17
B. Penguasaan, Hak Milik, dan Barang Milik Negara	19
1. Pengertian Penguasaan	19
2. Pengertian Hak Milik	19
3. Perolehan Hak Milik	22
4. Barang Milik Negara	23
5. Pengelola Barang Milik Negara	26
6. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang atas Barang Milik Negara	28
7. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	28
8. Penggunaan Barang Milik Negara	29
9. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara	29
10. Kekayaan Negara	31
11. Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>) dan Badan Usaha Milik Negara sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan	32
12. Penatausahaan, Inventarisasi, Penilaian, dan Konsekuensi Hilangnya Barang Milik Negara	33
C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Neraca Pemerintah Pusat	34
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	34
2. Neraca Pemerintah Pusat atau Neraca Pemerintah Republik Indonesia ..	36
3. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas	36
4. Penyajian dan Pengungkapan dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia	38
5. Materialitas	40
6. <i>Substance Over Form Principle</i>	41
7. Entitas Akuntansi (<i>Accounting Entity</i>) and Entitas Pelaporan (<i>Reporting Entity</i>)	41
8. Pengendalian Barang Milik Negara melalui Pembukuan/ Akuntansi	43

D.	Asas-asas Hukum	43
1.	Kepastian Hukum	44
2.	Kemanfaatan	46
3.	Keadilan	51
BAB III METODE PENELITIAN		55
A.	Sifat Penelitian	55
B.	Jenis Penelitian	55
C.	Jenis Data	55
D.	Bahan atau Materi Penelitian	56
E.	Analisis Data	61
F.	Sarana Penelitian	62
G.	Lokasi Penelitian	62
H.	Kurun Waktu	62
I.	Jalannya Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Proses Penyerahan Hak Kepemilikan yang Memenuhi Asas Kepastian Hukum belum Dilakukan oleh Kontraktor KKS kepada Pemerintah Republik Indonesia	63
1.	Belum adanya tindakan resiprokal berupa serah terima Aset Kontraktor KKS antara Kontraktor KKS sebagai Penyerah dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Penerima, baik dengan maupun tanpa SKK Migas sebagai Entitas Antara (<i>Intermediary Entity</i>).....	66
a.	Penyerahan hak kepemilikan dilakukan hanya dalam bentuk penyerahan Daftar Aset setiap tahun yang merupakan proses administrasi pelaporan biasa	66
b.	Prinsip-prinsip umum Penyerahan Hak Kepemilikan belum dilakukan yaitu belum adanya identifikasi kuantitas, kualitas, dan nilai wajar Aset Kontraktor KKS	68
2.	Belum adanya penguasaan langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia atau penempatan dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan adanya pemanfaatan Aset Kontraktor KKS yang berbeda dari <i>Petroleum Operation PSC</i>	71
B.	Penyajian dan Pengungkapan Aset Kontraktor KKS Tidak Memenuhi Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan	74
1.	Penyajian dan Pengungkapan Aset Kontraktor KKS pada Neraca Pemerintah Republik Indonesia Tidak Memenuhi Asas Kemanfaatan	74
a.	Tidak dipenuhinya daya penjas informasi neraca	77
b.	Menjadi kaburnya keterkaitan Neraca Pemerintah Pusat dengan unsur-unsur laporan keuangan dan mekanisme pembukuan	89
c.	Aset Kontraktor KKS menjadi praktek <i>Window Dressing Financial Statement</i>	91
d.	Munculnya masalah potensial dari penyajian dan pengungkapan Aset Kontraktor KKS pada Neraca Pemerintah Republik Indonesia.	94
2.	Penyajian dan Pengungkapan Aset Kontraktor KKS pada Neraca Pemerintah Republik Indonesia Tidak Memenuhi Asas Keadilan	96



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN HAK KEPEMILIKAN ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA
SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
DAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPANNYA DALAM NERACA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**
WASITO, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

a. Tidak dipenuhinya keseimbangan pengakuan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Republik Indonesia	99
b. Tidak dipenuhinya hak pengguna laporan keuangan atas pengakuan hak dan kewajiban yang seimbang dan komprehensif yang mengakibatkan penyajian informasi yang keliru atas likuiditas dan <i>solvabilitas</i>	101
c. Terjadinya tambahan prosedur pelaporan yang tidak memberikan tambahan manfaat	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	122